

BAB IV

KESIMPULAN

Kebijakan terkait pembuangan air limbah nuklir Fukushima merupakan hasil dari dinamika politik yang melibatkan beberapa pihak, termasuk aktor domestik yang diwakili oleh FCA sebagai kelompok oposisi dan IAEA sebagai aktor internasional yang bertanggung jawab atas standar regulasi yang diberlakukan. Jepang memiliki tanggung jawabnya dalam mempertimbangkan dua aspek aktor tersebut dalam membentuk kebijakan luar negerinya demi menghindari adanya kegagalan implementasi. FCA dapat dikatakan sebagai kelompok oposisi yang memiliki legitimasinya dalam menyuarakan kepentingan federasi karena menaungi hampir seluruh komunitas nelayan yang bergerak di seluruh wilayah Jepang. Tidak hanya FCA, dampak dari *Fukushima accident* juga dirasakan oleh bidang pertanian dan pariwisata sehingga Jepang sebagai regulator tentu perlu untuk memperhatikan kepentingan subjek seperti FCA untuk menghindari adanya reaksi politik dalam negeri setelah kebijakan dikeluarkan. Di sisi lain, untuk mendukung justifikasi dari tindakan yang dilakukan oleh Jepang, IAEA sebagai organisasi internasional memiliki perannya untuk melakukan pengawasannya terhadap seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Jepang terkait dengan proses pembuangan air limbah nuklir. Dalam hal ini, ketika Jepang gagal melakukan tanggung jawabnya, IAEA juga akan kehilangan legitimasinya dalam kepercayaan publik.

Melalui dinamika antara FCA sebagai kelompok oposisi dalam negeri dan Jepang sebagai negara regulator, dihasilkan suatu pilihan rezim, yaitu pengabaian. Meskipun FCA sebagai pemangku kepentingan domestik yang terdampak secara langsung dapat dikatakan telah melakukan penolakan yang sangat kuat secara tersirat maupun tersurat, pemerintah Jepang memilih untuk meningkatkan legitimasinya terkait dengan kebijakan bersama TEPCO dan IAEA. Pengabaian dilakukan karena pemerintah Jepang ingin menghindari negosiasi yang dapat memperlambat implementasi kebijakan mengingat kebutuhan revitalisasi dan rekonstruksi Fukushima yang mendesak. Sebagai respon terhadap hal tersebut,

hingga pada hari pertama implementasi kebijakan, FCA tetap menyatakan penolakan tegasnya terkait dengan pembuangan air limbah nuklir menuju laut dan menuntut sumber data yang dapat memandu persepsi masyarakat terkait dengan risiko pasca pembuangan. Di sisi lain, Jepang selaku regulator bersama dengan TEPCO selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan menyatakan komitmennya untuk melakukan pemantauan jangka panjang terhadap dampak lingkungan yang berkelanjutan serta memastikan keamanan dan kepercayaan publik melalui pengawasan yang berkelanjutan.

